



## ANALISIS RASIO KEUANGAN DALAM MENILAI KINERJA KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH KOTA TEBING

Fitriani Saragih<sup>1</sup> Ilda Azilla Siregar<sup>2</sup>  
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
[fitrianisaragih@umsu.ac.id](mailto:fitrianisaragih@umsu.ac.id)

### **ABSTRACT**

*The purpose of this study was to determine and analyze the financial performance of Tebing Tinggi City Government when viewed from the Regional Financial Independence Ratio, PAD Effectiveness Ratio, Regional Financial Efficiency Ratio, Harmony Ratio, and Growth Ratio. This goal is motivated by the current condition in which local governments depend on subsidies from the central government which is reflected in the amount of central government assistance from the point of view of the routine budget. The low ability of the regions to explore potential PAD sources, which is reflected in the relatively small acceptance of Regional Original Revenue (PAD) compared to total regional revenue, the lack of effort and the ability of regional revenue to manage and explore existing sources of income, the inefficiency of local governments in spending area of research is quantitative descriptive research. The results of this study conclude that the ratio of independence is still very low, the effectiveness ratio of PAD is said to be good, the efficiency ratio is said to be bad, the compatibility ratio is said to be bad, the growth ratio is negative..*

**Keywords :** *Financial Performance, Regional Financial Ratios*

### **PENDAHULUAN**

Perkembangan akuntansi sektor publik di Indonesia mengalami kemajuan yang pesat seiring dilaksanakannya otonomi daerah. Otonomi daerah adalah pemberian wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan daerahnya serta kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Hak otonomi kepada masing-masing daerah atau kabupaten akan memberikan kebebasan untuk mengolah dan meningkatkan sumber pendapatannya, demi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah tersebut. Semakin tinggi realisasi pendapatan yang dicapai, hendaknya dapat mencerminkan semakin baik kinerja pemerintah daerah sesuai dengan hasil yang telah dicapai. Oleh sebab itu, masyarakat dituntut untuk lebih berfikir kritis terhadap kinerja pemerintah daerah, dibutuhkannya transparansi dan akuntabilitas publik oleh lembaga sektor publik. Akuntabilitas tidak sekedar menunjukkan kemampuan lembaga sektor publik dalam penggunaan uang publik, tetapi juga menunjukkan kemampuan memberikan jaminan dari penggunaan sumber-sumber dana publik termasuk pengalokasian sumber daya secara ekonomis, efisien dan efektif melalui pelaksanaan manajemen publik yang baik (Indrayani & Khairunnisa, 2018).

Undang-undang No. 32 Tahun 2004 memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam mengatur semua urusan pemerintahan dan memungkinkan daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Kewenangan otonomi yang luas mewajibkan pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat secara demokratis, adil, merata, dan berkesinambungan. Dengan diberlakukannya kewenangan otonomi daerah, diharapkan semua daerah di Indonesia mampu melaksanakan semua urusan pemerintahan dan pembangunan dengan bertumpu pada Pendapatan Asli daerah (PAD) yang dimilikinya. Keberhasilan pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan otonomi daerah dapat dilihat dari kinerja keuangan Pemerintah Daerah tersebut (Rahayu, 2016).



Kinerja merupakan suatu pencapaian yang telah direncanakan, baik oleh pribadi maupun organisasi. Apabila pencapaian sesuai dengan yang direncanakan, maka kinerja yang dilakukan terlaksana dengan baik. Apabila pencapaian melebihi dari apa yang direncanakan dapat dikatakan kinerjanya sangat bagus. Apabila pencapaian tidak sesuai dengan apa yang direncanakan atau kurang dari apa yang direncanakan, maka kinerjanya jelek. Pengukuran kinerja keuangan untuk kepentingan publik dapat dijadikan evaluasi dan memulihkan kinerja dengan pembandingan skema dan pelaksanaannya. Selain itu dapat juga digunakan sebagai tolak ukur untuk peningkatan kinerja khususnya keuangan pemerintah daerah pada periode berikutnya.

Menurut Susanti, Raharjo & Oemar (2017) Ada beberapa cara untuk mengukur Kinerja Keuangan Daerah yaitu dengan menggunakan Rasio Kinerja Keuangan Daerah. Beberapa rasio yang bisa digunakan adalah: Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Keserasian, dan Rasio Pertumbuhan. Menurut Lubis & Hafni (2017) salah satu ciri utama daerah mampu dalam melaksanakan otonomi daerah adalah terletak pada kemampuan keuangan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya dengan tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat mempunyai proporsi yang semakin mengecil dan diharapkan bahwa PAD harus menjadi bagian terbesar dalam memobilisasi dana penyelenggaraan pemerintah daerah. Menurut Sari el al (2020) dana perimbangan atau dana transfer memiliki fungsi yang sangat penting dalam pencapaian efisiensi dan keseimbangan dalam memberikan layanan jasa publik, dikarenakan berpengaruh terhadap kinerja keuangan dimana pendapatan yang diperoleh dari pusat selalu menggambarkan ketergantungan daerah dalam memenuhi kebutuhannya terhadap pemerintah pusat yang berakibat menurunnya kinerja keuangan. Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan sesuatu yang dasar dalam mempengaruhi APBD dikarenakan kontribusi PAD Terhadap APBD sangatlah besar, semakin besar PAD maka semakin minim suatu daerah yang bergantung kepada pemerintah pusat (Sari el al, 2020). Kemampuan daerah dalam menggali dan memanfaatkan potensi daerah untuk menghasilkan pendapatan asli daerah tentunya dapat meningkatkan pendapatan daerah. Pendapatan asli daerah yang dihasilkan daerah memiliki kontribusi terhadap pertumbuhan pendapatan sehingga pemerintah daerah mampu meminimalkan ketergantungannya terhadap bantuan pendanaan yang bersumber dari pusat. Tingkat belanja modal (pembangunan) yang tinggi memberikan gambaran dari infrastruktur dan sarana yang yang dibangun. Pada umumnya apabila tingkat pembangunan tinggi, maka akan meningkatkan pelayanan yang diterima oleh masyarakat setempat yang akan memberikan dampak yang baik terhadap kinerja daerah tersebut. Hal ini membuktikan, semakin banyak belanja modal yang digunakan maka kemampuan dalam mengukur kinerja keuangan mengalami peningkatan (Sari el al, 2020). Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis kinerja keuangan Pemerintahan Kota Tebing Tinggi jika dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Keserasian, dan Rasio Pertumbuhan..

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Pengertian Kinerja Keuangan Daerah**

Menurut Peraturan Pemerintahan RI No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 1 ayat 35 kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Pengukuran kinerja merupakan suatu proses untuk menilai kegiatan yang telah dilaksanakan apakah telah mencapai keberhasilan sesuai dengan target yang telah direncanakan (Indrayani & Khairunnisa, 2018). Menurut Pilat & Morasa (2017) “Sistem



pengukuran kinerja sektor publik adalah sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan nonfinansial.”

Sedangkan menurut Ardila & Putri (2015) “Kinerja keuangan merupakan salah satu isu yang sangat penting untuk dikaji dalam organisasi sektor publik termasuk pemerintahan, sejak diterapkannya penganggaran berbasis kinerja, semua pemerintah dituntut untuk mampu menghasilkan kinerja keuangan pemerintah secara baik.”

### **Tujuan Kinerja Keuangan Daerah**

Tujuan Pengukuran Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah menurut Sinambela, Saragih & Sari (2018) adalah untuk memenuhi tiga maksud, yaitu: Untuk memperbaiki kinerja pemerintah, ukuran kinerja dimaksudkan untuk membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan efektivitas dalam memberikan pelayanan publik. Untuk mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan. Untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

### **Manfaat Kinerja Keuangan Daerah**

Manfaat Pengukuran Kinerja menurut Dewi (2018) menyebutkan lima manfaat adanya pengukuran kinerja suatu entitas pemerintahan, yaitu: Pengukuran kinerja meningkatkan mutu. Pengukuran kinerja meningkatkan mutu pengambilan keputusan. Seringkali keputusan yang diambil pemerintah dilakukan dalam keterbatasan data dan berbagai pertimbangan politik serta tekanan dari pihak-pihak yang berkepentingan. Proses pengembangan pengukuran kinerja ini akan memungkinkan pemerintah untuk menentukan misi dan menetapkan tujuan pencapaian hasil tertentu. Di samping itu dapat juga dipilih metode pengukuran kinerja untuk melihat kesuksesan program yang ada. Di sisi lain, adanya pengukuran kinerja membuat pihak legislatif dapat memfokuskan perhatian pada hasil yang didapat, memberikan evaluasi yang benar terhadap pelaksanaan anggaran serta melakukan diskusi mengenai usulan-usulan program baru. Pengukuran kinerja meningkatkan akuntabilitas internal. Dengan adanya pengukuran kinerja ini, secara otomatis akan tercipta akuntabilitas di seluruh lini pemerintahan, dari lini terbawah sampai teratas. Lini teratas pun kemudian akan bertanggungjawab kepada pihak legislatif. Dalam hal ini disarankan pemakaian system pengukuran standar seperti halnya *management by objectives* untuk mengukur *outputs* dan *outcomes*.

Pengukuran kinerja meningkatkan akuntabilitas publik.

Meskipun bagi sebagian pihak, pelaporan evaluasi kinerja pemerintah kepada masyarakat dirasakan cukup menakutkan, namun publikasi laporan ini sangat penting dalam keberhasilan sistem pengukuran kinerja yang baik. Keterlibatan masyarakat terhadap pengambilan kebijakan pemerintah menjadi semakin besar dan kualitas hasil suatu program juga semakin diperhatikan. Pengukuran kinerja mendukung perencanaan strategi dan penetapan tujuan. Proses perencanaan strategi dan tujuan akan kurang berarti tanpa adanya kemampuan untuk mengukur kinerja dan kemajuan suatu program. Tanpa ukuran-ukuran ini, kesuksesan suatu program juga tidak pernah akan dinilai dengan obyektif. Pengukuran kinerja memungkinkan suatu entitas. Untuk menentukan penggunaan sumber daya secara efektif. Masyarakat semakin kritis untuk menilai program-program pokok pemerintah sehubungan dengan meningkatnya pajak yang dikenakan kepada mereka.

Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Daerah

Sedangkan menurut Ridwan & Mus'id (2019) Banyak faktor yang dapat mempengaruhi kinerja organisasi sektor publik, antara lain :

Tujuan yang jelas dan terukur.



## Rasio Keuangan Daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan sesuai target yang ditetapkan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan restribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian maka tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern semakin rendah, dan demikian pula sebaliknya. Rasio kemandirian diukur dengan:  $RKKD = PAD / (\text{Pendapatan Transfer}) \times 100\%$  Pola hubungan instruktif, di mana peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah). Pola hubungan konsultatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah. Pola hubungan partisipatif, peranan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi daerah. Pola hubungan delegatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

## Rasio Efektivitas PAD

Rasio Efektivitas PAD menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan (Fathah, 2017). Rasio Efektivitas PAD dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD atau yang dianggarkan sebelumnya. Rumus rasio ini adalah sebagai berikut:

Rasio Efektivitas PAD =  $(\text{Realisasi PAD}) / (\text{Anggaran PAD}) \times 100\%$

Kriteria Rasio Efektivitas menurut Susanti, Raharjo & Oemar (2017), adalah:

Jika diperoleh nilai kurang dari 100% ( $x < 100\%$ ) berarti tidak efektif.

Jika diperoleh nilai sama dengan 100% ( $x = 100\%$ ) berarti efektivitas berimbang.

Jika diperoleh nilai lebih dari 100% ( $x > 100\%$ ) berarti efektif.

## Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Menurut Fathah (2017) Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD) menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Semakin kecil Rasio Efisiensi Keuangan Daerah berarti Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah semakin baik. Rumus yang digunakan untuk Rasio Keserasian menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada Belanja Rutin dan Belanja Pembangunannya secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk Belanja Rutin berarti persentase Belanja investasi (Belanja Pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil (Susanti, Raharjo & Oemar, 2017). Ada dua perhitungan dalam Rasio Keserasian ini, yaitu: Rasio Belanja Operasi dan Rasio Belanja Modal. Rasio Belanja Operasi merupakan perbandingan antara Total Belanja Operasi dengan Total Belanja Daerah. Pada umumnya proporsi Belanja Operasi mendominasi total belanja daerah, yaitu antara 60-90% Pemerintah daerah dengan tingkat pendapatan yang tinggi cenderung memiliki porsi belanja operasi yang lebih tinggi dibandingkan pemerintah daerah yang tingkat pendapatannya rendah (Fathah, 2017). Rasio belanja operasi dirumuskan sebagai berikut:

Rasio Belanja Operasi =  $(\text{Total Belanja Operasi}) / (\text{Total Belanja Daerah}) \times 100\%$

Rasio Belanja Modal merupakan perbandingan antara Total Belanja Modal dengan



Total Belanja Daerah. Belanja modal memberikan manfaat jangka menengah dan panjang juga bersifat rutin. Pada umumnya proporsi belanja modal dengan belanja daerah antara 5-20% (Fathah, 2017). Rasio belanja modal ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Modal} = (\text{Total Belanja Modal}) / (\text{Total Belanja Daerah}) \times 100\%$$

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian adalah deskriptif kuantitatif, yakni peneliti mendatangi objek penelitian secara langsung guna memperoleh data-data maupun informasi yang mendukung pemecahan masalah penelitian. Definisi operasional adalah suatu usaha untuk melakukan pendeteksiaan sejauh mana variabel berpengaruh terhadap variabel lainnya. Salah satu perangkat untuk melakukan pengawasan terhadap pemerintah daerah dalam mengelola keuangan di dalam APBD adalah dengan melakukan analisa terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah melalui analisa rasio keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (ABPD), yaitu : Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Keresasian, dan Rasio Pertumbuhan. Penelitian ini dilakukan pada Kantor Walikota Tebing Tinggi di bagian akuntansi, Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan, Dan Aset Daerah Jln. Dr. Sutomo, Rambung, Kec. Tebing Tinggi, Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara 20616. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, dimana data ini berupa data yang dihitung yaitu data Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pemerintahan Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan, Dan Aset Daerah Kota Tebing Tinggi tahun 2014-2019. Penelitian ini menggunakan data sekunder merupakan data yang diperoleh berupa data dokumentasi yaitu Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan, Dan Aset Daerah Kota Tebing Tinggi tahun 2014-2019. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah: Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengadakan pencatatan yang bersumber dari dokumen, dan laporan hasil dari anggaran dan realisasi pendapatan dan belanja daerah Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan, Dan Aset Daerah Kota Tebing Tinggi selama tahun 2014-2019 yang diperlukan oleh peneliti. Teknik analisis data menggunakan metode deskriptif pendekatan kuantitatif yang merupakan metode yang digunakan untuk merumuskan perhatian terhadap masalah yang dihadapi, dimana data yang dikumpulkan, disusun dan dianalisis sehingga dapat memberikan informasi masalah yang ada.

## HASIL PENELITIAN DAN DISKUSI

### Hasil Penelitian

#### Uji Normalitas

#### Penghitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah BPKPAD Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2014-2019

Tahun	Realisasi PAD (Rp)	Pendapatan Transfer (Rp)	Rasio Kemandirian (%)	Pola Hubungan
2014	74.515.273.851,97	436.868.476.540,00	17,06	Instruktif
2015	82.410.053.810,21	462.561.984.813,00	17,82	Instruktif
2016	94.058.491.717,40	557.996.175.287,00	16,86	Instruktif
2017	113.222.874.687,17	566.917.829.684,00	19,97	Instruktif
2018	114.048.354.142,71	540.901.919.396,00	21,08	Instruktif
2019	105.239.918.351,52	547.285.111.940,00	19,23	Instruktif



**Sumber : BPKPAD Kota Tebing Tinggi (diolah)**

Dilihat dari hasil perhitungan tabel 4.1 di atas, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah kemampuan keuangan BPKPAD Kota Tebing Tinggi tergolong Rendah Sekali dan pola hubungannya termasuk pola hubungan Instruktif dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah). Terjadi kenaikan maupun penurunan dari tahun 2014 sampai tahun 2019. Berawal pada tahun 2014 Rasio Kemandirian sebesar 17,06%, kemudian naik menjadi 17,82% pada tahun 2015. Pada tahun 2016 Rasio Kemandirian turun sebesar 16,86% kemudian naik pada tahun 2017 sebesar 19,97%. Pada tahun 2018 terjadi kenaikan menjadi 21,08% dan turun kembali pada tahun 2019 sebesar 19,23%.

Menurut uraian di atas dapat disimpulkan bahwa rasio kemandirian Pemerintah Kota Tebing Tinggi tahun 2014 sampai tahun 2019 masih termasuk dalam kategori sangat rendah dan termasuk dalam pola hubungan instruktif yaitu peranan pemerintahan pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah), ini dapat dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah masih tergolong dalam diantara 0% dan 25%.

Hasil dari perhitungan Rasio Efektivitas PAD dapat dilihat pada tabel di bawah ini :  
**Penghitungan Rasio Efektivitas PAD BPKPAD Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2014-2019**

Tahun	Realisasi PAD (Rp)	Anggaran PAD (Rp)	Rasio Efektivitas (%)	Kriteria
2014	74.515.273.851,97	65.945.890.342,00	112,99	Efektif
2015	82.410.053.810,21	79.551.848.210,00	103,59	Efektif
2016	94.058.491.717,40	96.675.127.242,00	97,29	Tidak Efektif
2017	113.222.874.687,17	121.548.410.113,00	93,15	Tidak Efektif
2018	114.048.354.142,71	105.579.950.493,00	108,02	Efektif
2019	105.239.918.351,52	119.116.990.780,10	88,35	Tidak Efektif

**Sumber : BPKPAD Kota Tebing Tinggi (diolah)**

Berdasarkan perhitungan tabel 4.2 di atas dapat diketahui bahwa Rasio Efektivitas PAD dapat diketahui bahwa Efektivitas PAD Keuangan BPKPAD Kota Tebing Tinggi pada tahun 2014 sebesar 112,99%, tahun 2015 sebesar 103,59%, tahun 2016 sebesar 97,29%, tahun 2017 sebesar 93,15%, tahun 2018 sebesar 108,02%, dan tahun 2019 sebesar 88,35%. Efektivitas kinerja keuangan Kota Tebing Tinggi untuk tahun 2014, 2015, dan 2018 sudah Efektif karena nilai yang diperoleh sudah lebih dari 100%. Untuk tahun 2016, 2017, dan 2019 berjalan Tidak Efektif karena efektivitasnya masih di bawah 100%.

Menurut uraian dan hasil perhitungan pada Rasio Efektivitas PAD Efektivitas Kinerja Keuangan Kota Tebing Tinggi sudah Efektif karena rata-rata efektivitasnya di atas 100% yaitu 100,57%. Hal ini disebabkan karena penerimaan dari sektor pajak dan retribusi daerah melebihi dari yang dianggarkan sebelumnya. Pemerintah Kota Tebing Tinggi juga dapat dikatakan memiliki kinerja yang baik dalam hal merealisasikan PAD yang telah direncanakan kecuali pada tahun 2016, 2017, dan 2019. Namun untuk tetap mempertahankan hal tersebut, Pemerintah Daerah harus terus mengoptimalkan penerimaan dari potensi pendapatannya yang telah ada.



**Penghitungan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah BPKPAD Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2014-2019**

Tahun	Realisasi Belanja Daerah (Rp)	Realisasi Pendapatan (Rp)	Rasio Efisiensi (%)	Kriteria
2014	614.015.440.542,58	628.621.517.914,97	97,68	Efisien
2015	666.789.251.487,93	667.061.086.952,21	99,96	Efisien
2016	760.702.935.123,17	707.957.368.508,40	107,45	Tidak Efisien
2017	699.043.052.154,00	711.630.009.618,17	98,23	Efisien
2018	746.857.086.076,33	717.784.276.096,71	104,05	Tidak Efisien
2019	691.772.850.871,40	713.313.296.387,52	96,98	Efisien

**Sumber : BPKPAD Kota Tebing Tinggi (diolah)**

Dapat dilihat dari hasil perhitungan tabel 4.3 di atas bahwa Rasio Efisiensi Keuangan Daerah juga diketahui bahwa rata-rata Efisiensi Keuangan Daerah Kota Tebing Tinggi tahun 2014 sampai dengan 2019 sebesar 100,72% atau dapat dikatakan Tidak Efisien. Pada tahun 2014 Rasio Efisiensinya sebesar 97,68%, kemudian tahun 2015 naik menjadi 99,96%. Mengalami kenaikan tahun 2016 menjadi sebesar 107,45%, kemudian tahun 2017 mengalami penurunan menjadi sebesar 98,23%. Tahun 2018 mengalami kenaikan kembali menjadi sebesar 104,05% dan mengalami penurunan kembali menjadi sebesar 96,98% di tahun 2019.

Rata-rata Efisiensi Keuangan Daerah Kota Tebing Tinggi tergolong Tidak Efisien karena rata-rata rasionya 100,72%. Dapat dikatakan kinerja Pemerintah Kota Tebing Tinggi dalam hal ini masih buruk karena belum dapat menekan jumlah belanja daerahnya.

Hasil dari perhitungan Rasio Belanja Operasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini :  
**Penghitungan Rasio Belanja Operasi BPKPAD Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2014-2019**

Tahun	Belanja Operasi (Rp)	Total Belanja Daerah (Rp)	Rasio Belanja Operasi (%)
2014	450.433.316.497,58	614.015.440.542,58	73,36
2015	508.287.656.243,18	666.789.251.487,93	76,23
2016	557.181.221.083,17	760.702.935.123,17	73,25
2017	514.582.412.676,00	699.043.052.154,00	73,61
2018	543.306.946.643,62	746.857.086.076,33	72,75
2019	538.197.528.799,71	691.772.850.871,40	77,80

**Sumber : BPKPAD Kota Tebing Tinggi (diolah)**

Hasil dari perhitungan Rasio Belanja Modal dapat dilihat pada tabel di bawah ini :  
**Penghitungan Rasio Belanja Modal BPKPAD Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2014-2019**

Tahun	Belanja Modal (Rp)	Total Belanja Daerah (Rp)	Rasio Belanja Modal (%)
2014	163.582.124.045,00	614.015.440.542,58	26,64
2015	158.487.242.000,75	666.789.251.487,93	23,77
2016	203.355.262.407,00	760.702.935.123,17	26,73
2017	184.156.162.478,00	699.043.052.154,00	26,34
2018	203.340.069.232,71	746.857.086.076,33	27,23



2019	153.577.322.071,69	691.772.850.871,40	22,20
------	--------------------	--------------------	-------

**Sumber : BPKPAD Kota Tebing Tinggi (diolah)**

Dari perhitungan Rasio Keserasian tersebut dapat dilihat bahwa Rasio Belanja Operasi dan Rasio Belanja Modal yang belum stabil dari tahun ke tahun. Dimulai pada tahun 2014 Rasio Belanja Operasinya sebesar 73,36% mengalami kenaikan pada tahun 2015 menjadi 76,23%, kemudian turun pada tahun 2016 menjadi 73,25%, dan pada tahun 2017 naik lagi menjadi 73,61%. Kemudian turun lagi pada tahun 2018 menjadi 72,62% dan naik lagi menjadi 77,80% di tahun 2019, sehingga rata-rata rasionya sebesar 74,50%. Pada Rasio Belanja Modal pada tahun 2014 sebesar 26,64% turun menjadi 23,77% pada tahun 2015. Pada tahun 2016 mengalami kenaikan menjadi 26,73% dan turun lagi pada tahun 2017 menjadi 26,34%. Pada tahun 2018 terjadi peningkatan menjadi 27,23% dan turun lagi menjadi 22,20% di tahun 2019, sehingga rata-rata rasionya sebesar 25,49%.

Menurut uraian dan perhitungan di atas bahwa sebagian besar dana yang dimiliki Pemerintah Daerah Kota Tebing Tinggi masih diprioritaskan untuk kebutuhan belanja operasi sehingga rasio belanja modal relatif kecil. Besarnya alokasi dana untuk belanja operasi terutama dikarenakan besarnya dinas-dinas otonomi dan belanja pegawai untuk gaji ASN. Dengan ini dapat menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Tebing Tinggi yang lebih condong pada pengeluaran-pengeluaran rutin untuk pemenuhan aktivitas pemerintahan dan belum memperhatikan pembangunan daerah.

Hasil dari perhitungan Rasio Pertumbuhan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Penghitungan Rasio Pertumbuhan BPKPAD Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2014-2019**

Keterangan	Tahun						Rata-rata
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
PAD	74.515.273.851,97	82.410.053.810,21	94.058.491.717,40	113.222.874.687,17	114.048.354.142,71	105.239.918.351,52	
Pertumbuhan PAD	-	10,59%	14,13%	20,37%	0,73%	-7,72%	7,62%
Pendapatan	628.621.517.914,97	667.061.086.952,21	707.957.368.508,40	711.630.009.618,17	717.784.276.096,71	713.313.296.387,52	
Pertumbuhan Pendapatan	-	6,11%	6,13%	0,52%	0,86%	-0,62%	2,60%
Belanja Operasi	450.433.316.497,58	508.287.656.243,18	557.181.221.083,17	514.582.412.676,00	542.398.350.143,62	538.197.528.799,71	
Pertumbuhan Belanja Operasi	-	12,84%	9,62%	-7,65%	5,41%	-0,77%	3,89%
Belanja Modal	163.582.124.045,00	158.487.242.000,75	203.355.262.407,00	184.156.162.478,00	203.340.069.232,71	153.577.322.071,69	
Pertumbuhan Belanja Modal	-	-3,11%	28,31%	-9,44%	10,42%	-24,47%	0,34%

**Sumber : BPKPAD Kota Tebing Tinggi (diolah)**

Berdasarkan perhitungan pada tabel 4.6 di atas jika dilihat dari perkembangan dari tahun ke tahun yang rata-rata mengalami kenaikan. Tahun 2015 tumbuh 6,11% dibandingkan tahun sebelumnya dan tahun 2016 mengalami kenaikan paling tinggi yaitu sebesar 6,13% dari tahun sebelumnya. Tahun 2017 sebesar 0,52%, tahun 2018 sebesar 0,86%, dan tahun 2019 mengalami penurunan yang terendah dibandingkan pertumbuhan tahun yang lain yaitu sebesar (0,62%). Upaya pemerintah Kota Tebing Tinggi untuk selalu meningkatkan pendapatan daerahnya bisa dikatakan berhasil meskipun sebagian besar pendapatannya masih bersumber dari bantuan dari pihak pusat. PAD masih kecil dibandingkan dengan bantuan dari pusat.

Berdasarkan penghitungan Rasio Pertumbuhan PAD, PAD Kota Tebing Tinggi rata-rata mengalami peningkatan. Rata-rata Rasio Pertumbuhan PAD dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 sebesar 7,62%. Berawal dari tahun 2015 yaitu sebesar 10,59%, tumbuh





menjadi sebesar 14,13% pada tahun 2016, dan mengalami pertumbuhan lagi sebesar 20,37%. Kemudian turun di tahun 2018 menjadi 0,73% dan turun lagi sebesar (7,72%) di tahun 2019. Pemerintah Kota Tebing Tinggi harus selalu meningkatkan PADnya dengan cara mengoptimalkan berbagai macam potensi yang dimilikinya. Akan lebih baik apabila tidak terlalu bergantung pada bantuan dari pemerintah pusat agar bisa mandiri mengelola daerahnya dengan PAD yang tinggi.

Jika dilihat dari perkembangan dari tahun ke tahun Rasio Pertumbuhan Belanja Operasi mengalami kenaikan dan penurunan. Tahun 2015 tumbuh 12,84% dan tahun 2016 mengalami penurunan yaitu sebesar 9,62% dari tahun sebelumnya. Tahun 2017 mengalami penurunan kembali sebesar (7,65%) yang terendah dibandingkan pertumbuhan tahun yang lain. Tahun 2018 naik sebesar 5,41% dan turun kembali menjadi (0,77%) di tahun 2019. Rata-rata pertumbuhannya sebesar 3,89%. Rasio Pertumbuhan Belanja Modal juga mengalami kenaikan dan penurunan, dari turun sebesar (3,11%) pada tahun 2015 kemudian naik menjadi 28,31% pada tahun 2016. Turun kembali sebesar (9,44%) pada tahun 2017 dan naik kembali 10,42% pada tahun 2018. Dan turun lagi di tahun 2019 menjadi (24,47%), sehingga rata-rata pertumbuhannya sebesar 0,34%. Jika dilihat dari perkembangan Rasio Pertumbuhan Belanja Operasi dan Modal bisa dikatakan buruk, terutama pertumbuhan Rasio Belanja Operasi yang rata-rata mengalami kenaikan yang dapat dilihat dari proporsi jumlahnya lebih besar dibandingkan dengan jumlah Belanja Modal. Apabila pemerintah daerah berani mengurangi Belanja Operasinya untuk dialokasikan ke Belanja Modal maka dapat dikatakan Pemerintah Daerah tersebut mengutamakan pembangunan di daerahnya.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan dari analisis kinerja Pemerintah Daerah Kota Tebing Tinggi yang di ukur melalui rasio keuangan daerah maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Rasio kemandirian yang masih sangat rendah terjadi dikarenakan kurang mampunya Pemerintah Daerah Kota Tebing Tinggi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sehingga menyebabkan Pemerintah Daerah Kota Tebing Tinggi bergantung dengan pemerintah pusat.
2. Sedangkan untuk rasio efektivitas PAD dikatakan sudah baik dikarenakan Pemerintah Daerah Kota Tebing Tinggi mampu dalam mencapai target untuk pendapatan asli daerah tersebut.
3. Dan untuk rasio efisiensi dikatakan buruk karena Pemerintah Daerah Kota Tebing Tinggi belum dapat menekan jumlah belanja daerahnya.
4. Untuk rasio keserasian dikatakan buruk karena pengeluaran dana yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Tebing Tinggi sebagian besar dana yang dimiliki masih diprioritaskan untuk kebutuhan belanja operasi sehingga rasio belanja modal relatif kecil, dana pemerintah daerah yang lebih condong pada pengeluaran-pengeluaran rutin untuk pemenuhan aktivitas pemerintahan dan belum memperhatikan pembangunan daerah.
5. Dan untuk tingkat rasio pertumbuhannya negatif, karena nilai Total Pendapatan Daerah (TPD), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Belanja Operasi semakin tinggi sedangkan nilai Belanja Modal semakin rendah menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Tebing Tinggi belum mampu meningkatkan pertumbuhan daerahnya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :

1. Sebaiknya Pemerintah Kota Kota Tebing Tinggi lebih mengoptimalkan sumber-sumber PAD yang ada maupun yang belum diolah agar dapat meningkatkan PAD sehingga



ketergantungan terhadap sumber dana ekstern dapat diminimalisir. Sebenarnya potensi yang dimiliki Kota Tebing Tinggi mempunyai dampak yang besar bagi masyarakat sekitar. Potensi tersebut antara lain : di bidang pendidikan, kesehatan, pariwisata, kebudayaan, industri kreatif hingga perdagangan. Apabila pemerintah Kota Tebing Tinggi mampu memaksimalkan potensi tersebut, maka pajak yang merupakan pendapatan yang paling dominan dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah akan meningkat. Untuk mendukung peningkatan pajak dan retribusi, Pemerintah Kota Tebing Tinggi selalu melakukan pengawasan dan pengendalian secara benar dan berkelanjutan untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan dalam pemerolehan Pendapatan Asli Daerah. Pemerintah Kota Tebing Tinggi juga seharusnya tidak selalu mengandalkan bantuan dari pemerintah pusat. Agar kedepannya bisa tumbuh menjadi kota yang mandiri, mampu mengelola keuangannya dengan baik dan benar, serta kesejahteraan masyarakat lebih meningkat.

2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk lebih rinci lagi dalam menganalisa kinerja keuangan pemerintah daerah. Dengan menggunakan berbagai macam rasio yang lebih banyak dan bisa menggambarkan keadaan keuangan daerah yang sebenarnya. Selain itu, diharapkan penelitian selanjutnya untuk menambah lagi jangka waktu penelitian, tidak hanya 5 tahun saja. Peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas lingkup wilayah penelitian, tidak hanya mengambil dari 1 kota saja tetapi lebih luas lagi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, E. P. (2018). Good Governance Dan Transparansi Rencana Strategi Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. *Jurnal Lentera Bisnis*, 7(2).
- D., C., & Sumual, L. K. (2017). Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kota Tomohon. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 12(2), 782–791.
- Elizar Sinambela, F. S. (2018). Analisis Struktur APBD Dalam Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah Sumatera Utara. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 18(2).
- Elly Susanti, K. R. (2017). Analisis Rasio Laporan Keuangan APBD (Anggaran Pendapatan Daerah) Sebagai Tolok Ukur Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2012-2016. *Ekonomi - Akuntansi*.
- Fathah, R. N. (2017). Analisis Rasio Keuangan Untuk Penilaian Kinerja Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul. *Jurnal Ebbank*, 8(1), 33–48.
- Indrayani, K. (2018). Analisis Pengukuran Kinerja Dengan Menggunakan Konsep Value For Money Pada Pemerintah Kota Lhokseumawe (Studi Kasus Pada DPKAD Kota Lhokseumawe Periode 2014-2016). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 6(1).
- Juddy Julian Pilat, J. M. (2017). Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Kota Manado Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Manado Tahun Anggaran 2011-2015. *Jurnal Accountability*, 6(1), 45–56.
- Mentari Yosephen Sijabat, C. S. (2013). Analisis Kinerja Keuangan Serta Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Dan Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2008-2012). *Jurnal Administrasi Publik (Jap)*, 2(2), 236–242.
- Mertyani Sari Dewi, N. A. (2015). Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangli). *E-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 3(1).
- Mimba, D. N. (2016). Pengaruh Belanja Rutin Dan Belanja Modal Pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 14(3), 1924–1950.



- Muliani, R. (2018). Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Langsa Tahun Anggaran 2012-2016. *Tesis: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*.
- Mus'id, M. R. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Organisasi Sektor Publik (Studi Empiris Pada Dinas-Dinas Di Kota Jambi). *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, 12(2), 222–241.
- Novita Sari, B. R. (2020). Pengaruh Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan. *Journal Of Economic, Business And Accounting (4) 1*.
- Pohan, E. S. (2016). Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Riset Akuntansi & Bisnis*, 16(1).
- Pramono, J. (2014). Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Surakarta). *Among Makarti*, 7(13).
- Putri Kemala Dewi Lubis, N. H. (2017). Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhan Batu Tahun Anggaran 2011–2013. *Kitabah*, 1(1).
- Putri, I. A. (2015). Analisis Kinerja Keuangan Dengan Pendekatan Value For Money Pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 15(1).
- Rahayu, R. P. (2016). Analisis Atas Laporan Realisasi Anggaran Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Pamekasan. *Jurnal Manajemen & Kewirausahaan*, 1(1), 57–78.
- Sedana, N. P. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *E-Jurnal Manajemen Unud (7)2*, 1080-1110.
- Sri Suranta, B. H. (2017). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah: Studi Komparasi Propinsi Jawa Tengah Dan Kalimantan Selatan. *Jurnal Akuntansi*, 5(2).
- Susanto, H. (2019). Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah Kota Mataram. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis*, 7(1), 81–92.
- Utomo, D. P. (2017). Analisa Rasio Keuangan APBD Sebagai Tolak Ukur Penilaian Kinerja Keuangan Pada Pemda Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2007-2009. *Jurnal Education*, 6(2), 57–80.